



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Januari 2021

Nomor : 700/144/IJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengawasan Pelaksanaan  
Vaksinasi COVID-19

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati dan Wali Kota  
di  
Seluruh Indonesia


Menindaklanjuti Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Nomor S-19/6D2/03/2021 tanggal 11 Januari 2021 hal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Akan dilakukan pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang melibatkan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ruang lingkup pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 meliputi : perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, monitoring dan evaluasi kegiatan vaksinasi COVID-19, sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP 6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (terlampir).
3. Sehubungan dengan hal di atas, dimohon bantuannya untuk menugaskan Inspektur Daerah agar berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19, serta berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP di daerah masing-masing.
4. Agar menyampaikan laporan pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dimaksud secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal.
5. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan surat ini dapat berkoordinasi dengan Sdr. Andi Agung Nomor HP 081221616686.

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Inspektur Jenderal,



  
Tumpak Haposan Simanjuntak

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
4. Inspektur Utama BPOM.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

---

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR KEP 6 /K/D2/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf a Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf b Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengawasan Intern atas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH;

KESATU : Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,



ERI SATRIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR KEP /K/D2/2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN  
PELAKSANAAN VAKSINASI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) BAGI APARAT  
PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH KEMENTERIAN/  
LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI APIP  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

I. Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan

Sasaran Pengawasan adalah program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh:

A. Pusat

1. Kementerian Kesehatan RI.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Penyedia Penerima Penugasan/Penunjukan Langsung Pengadaan Vaksin COVID-19

B. Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

C. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas
2. Klinik
3. Rumah Sakit
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Ruang lingkup audit Pengawasan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

## II. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan di level pusat dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.

Pengawasan di level daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah, APIP K/L dan Perwakilan BPKP sesuai dengan wilayah kerjanya.

Masing-masing APIP agar mengalokasikan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19.

BPKP menjadi koodinator terhadap kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19 di tingkat pusat dan daerah.

## III. PROSEDUR PENGAWASAN

### A. Level Pusat

#### 1. Survey Pendahuluan

Mengumpulkan dokumen/ informasi :

- a. Struktur organisasi pelaksana vaksinasi COVID-19 tingkat pusat.
- b. Tata Kelola Obat/Vaksin COVID-19 dan distribusi ke provinsi.
- c. Sumber anggaran DIPA dan sumber keuangan lainnya tingkat pusat.
- d. Kebijakan target indikator keberhasilan program tingkat pusat.
- e. Data Sasaran penerima vaksin COVID-19 tingkat pusat.

#### 2. *Tentative Audit Objective* (TAO) di level pusat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Anggaran di level pusat tidak cukup
2)	Pendataan sasaran penerima vaksinasi COVID-19 tidak sesuai kriteria
3)	<i>Emergency Use Authorization (EUA)</i> ijin edar vaksin terlambat
4)	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran
5)	Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi tidak sesuai dengan ketentuan
6)	Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik ( <i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i> ), Alat Pelindung Diri (APD) dan <i>Cold Chain</i> ( <i>Cold Room, Freeze Room</i> ,

	<i>Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier</i> ) tidak sesuai dengan ketentuan.
b.	Monitoring
1)	Target output yang telah ditetapkan tidak tercapai.
2)	Terdapat hasil monitoring terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang tidak ditindaklanjuti.
3)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4)	Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran.
5)	Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti.
c.	Sumber Daya Manusia
1)	Pelaksanaan Pelatihan Vaksinator tidak sesuai dengan ketentuan.

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya oleh namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) TAO: Anggaran di level pusat tidak cukup.

Tujuan Pengawasan: memastikan anggaran memadai di level pusat.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan Data perencanaan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi dan bandingkan dengan rencana kebutuhan.
- b) Lakukan penelusuran dokumen anggaran untuk meyakini kecukupan anggaran.
- c) Lakukan wawancara untuk mengetahui kekurangan anggaran yang terjadi dan apa yang telah dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran.
- d) Lakukan pendalaman untuk mengetahui prioritas-prioritas yang dilakukan dan apa yang dilakukan untuk yang tidak masuk dalam prioritas.
- e) Lakukan analisa secara komprehensif untuk kemudian Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Pendataan sasaran penerima vaksinasi COVID-19 tidak sesuai dengan kriteria.

Tujuan Pengawasan: memastikan data sasaran penerima vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen resmi berupa:

- (1) Dapatkan dan pelajari ketentuan kriteria sasaran vaksinasi COVID -19.
- (2) Dapatkan dokumen data sasaran sesuai prioritas dari Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan sasaran vaksinasi COVID-19 dari Ditjen P2P / Unit Terkait.
- (4) Informasi dari Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 terkait data sasaran

b) Teliti dan pastikan apakah dokumen rencana kebutuhan tersebut:

- (1) Telah sesuai dengan data dari Pusdatin Kemenkes RI mengenai jumlah riil sasaran penerima vaksin COVID-19 di lapangan.
- (2) Telah sesuai dengan kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan pertimbangan dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

c) Teliti apakah terdapat kemungkinan duplikasi data sasaran dalam dokumen rencana kebutuhan vaksinasi COVID-19 tersebut khususnya pada kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19.

d) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian Data antara SK Menteri mengenai sasaran Vaksinasi COVID-19 dengan Data dari Pusdatin Kemenkes RI dan kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.



3) TAO: *Emergency Use Authorization* (EUA)/ijin edar vaksin terlambat.

Tujuan Pengawasan: membantu memastikan vaksin mendapatkan EUA/izin edar yang sesuai dan tepat waktu

Langkah Kerja Umum:

- a) Dapatkan kriteria atau aturan terkait penerbitan ijin edar/EUA
- b) Dapatkan UEA/ijin edar vaksin Covid-19 dari BPOM.
- c) Analisis data menggunakan metode root cause analysis (RCA) atau metode lainnya, untuk memperoleh faktor penyebab utama keterlambatan penerbitan EUA/ijin edar atau permasalahan lain yang ditemukan.
- d) Buat simpulan dan rumuskan atensi/rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran.

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen resmi berupa :

- (1) SK Menteri mengenai penetapan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Dokumen perhitungan jumlah kebutuhan vaksin COVID-19 beserta cara dan mekanisme perhitungannya.
- (3) Data dari Pusdatin Kemenkes RI/KPC-PEN mengenai jumlah rill sasaran penerima vaksin COVID-19 dilapangan.

b) Pastikan jumlah dan jenis vaksin sesuai dengan kebutuhan penyuntikan dosis I dan II.

- (1) Hitung jumlah kebutuhan vaksin untuk penyutikan dosis I dan II.
- (2) Bandingkan jumlah kebutuhan vaksin dengan sasaran.
- (3) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
- (4) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

5) TAO: Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi sesuai dengan ketentuan (tepat waktu dan tepat jumlah).

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 terkait distribusi dari pusat ke provinsi.
  - b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari pusat ke provinsi.
  - c) Lakukan perbandingan SOP/peraturan dengan kondisi di lapangan.
  - d) Dapatkan dokumen BAST dari PT. Biofarma (Persero) ke Ditjen Farmalkes, dari Ditjen Farmalkes ke provinsi .
  - e) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis vaksin, jumlah, spesifikasi, dan expired date.
  - f) Dapatkan informasi adanya komplain terkait distribusi vaksin.
  - g) Lakukan wawancara atau analisis untuk mengetahui penyebab permasalahan yang muncul.
  - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 6) TAO: Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *cold chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier)* tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: Memastikan Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier)* sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen resmi berupa :

- (1) Jumlah dan Jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *cold chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier)* yang diperlukan terkait Vaksinasi COVID-19.
- (2) *Swab, safety box*, Alat Pelindung Diri (APD) dan *cold chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier)* vaksin COVID-19 ke tiap provinsi

(3) Daftar distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *cold chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier)* yang diperlukan terkait vaksinasi COVID-19.

- b) Teliti dan periksa apakah perhitungan jumlah dan jenis peralatan pendukung serta logistic yang diperlukan terkait Vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan daftar distribusi yang ditetapkan.
- c) Pastikan distribusi peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *cold chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier)* vaksin COVID-19 ke tiap diterima dalam kondisi baik, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- d) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

b. Monitoring

1) TAO: Target output yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Tujuan Pengawasan: memastikan target output yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen resmi berupa :

- (1) Dokumen target output yang akan dicapai terkait vaksinasi COVID-19.
- (2) Dokumen capaian / realisasi output yang telah dicapai terkait vaksinasi COVID-19.

- b) Teliti dan analisa antara dokumen target dan realisasi apakah terdapat gap / perbedaan diantara keduanya.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
- d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Terdapat hasil monitoring terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang tidak ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: memastikan seluruh hasil monitoring terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 dari provinsi secara manual atau melalui aplikasi.
- b) Teliti dan analisa antara dokumen apakah terdapat hasil monitoring yang belum ditindaklanjuti.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan hasil monitoring tidak segera dapat ditindaklanjuti.
- d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan tersebut.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
- b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
- c) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- d) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
- e) Identifikasi permasalahan yang ada.
- f) Temukan penyebab permasalahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran.

Tujuan Pengawasan: memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin yang sudah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan.
- b) dapatkan data penerima vaksin dari *Primary Care (P-Care)* atau sumber lain
- c) Lakukan penelusuran terhadap ketepatan kriteria sasaran
- d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

5) TAO: Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Pusat.
- b) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Pusat. Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.
- c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI yang tercantum dalam laporan.
- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

c. Sumber Daya Manusia

1) TAO: Pelaksanaan Pelatihan Vaksinator tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: memastikan Pelaksanaan Pelatihan Vaksinator sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan pedoman penyelenggaraan pelatihan.

- b) Dapatkan dokumen laporan hasil pelaksanaan pelatihan vaksinator.
- c) Bandingkan hasil pelaksanaan dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan.
- d) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam Kertas Kerja.

B. Provinsi

1. Survey Pendahuluan

Mengumpulkan dokumen/ informasi :

- a. Struktur organisasi pelaksana vaksinasi COVID-19 tingkat provinsi.
- b. Tata Kelola Obat/Vaksin COVID-19 dan distribusi ke kabupaten/kota.
- c. Sumber anggaran DIPA dan sumber keuangan lainnya tingkat provinsi.
- d. Kebijakan target indikator keberhasilan program tingkat provinsi.
- e. Data Sasaran penerima vaksin COVID-19 tingkat provinsi.

2. *Tentative Audit Objective*

*Tentative Audit Objective* (TAO) di level provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
2)	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran
3)	Distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota tidak sesuai dengan ketentuan
4)	Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik ( <i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i> ), Alat Pelindung Diri (APD) dan <i>cold chain</i> ( <i>Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine Carrier</i> ) tidak sesuai dengan kebutuhan
b.	Monitoring
1)	Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti
2)	Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai jadwal
3)	Target output yang telah ditetapkan tidak tercapai
4)	Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran

5)	Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti
6)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
c.	Sarana Prasarana dan Logistik
1)	Kualitas <i>cold chain</i> vaksin di daerah provinsi seperti, <i>cold room</i> , <i>freeze room</i> , <i>refrigerator</i> , dan <i>freezer</i> tidak memadai.

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

**a. Perencanaan**

1) TAO: Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Memastikan pemerintah provinsi mempunyai dana dukungan vaksinasi

Langkah kerja pengawasan:

- a) Identifikasi usulan kebutuhan dana vaksinasi di provinsi.
- b) Identifikasi alokasi anggaran untuk kegiatan vaksinasi di provinsi dari berbagai sumber.
- c) Lakukan konfirmasi apabila terjadi gap antara usulan dengan alokasi anggaran vaksinasi.
- d) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data sasaran untuk tingkat provinsi dan rinciannya per kabupaten/kota.
- b) Dapatkan dokumen penerimaan vaksin untuk tingkat provinsi.
- c) Bandingkan jumlah vaksin yang diterima dengan jumlah sasaran.

- d) Lakukan stock opname vaksin COVID-19, dan tuangkan hasilnya dalam berita acara stok opname atau prosedur alternatif kegiatan pengawasan lainnya untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa jumlah vaksin yang diterima sesuai dengan yang dikirim dari pusat.
  - e) Bandingkan stock opname dengan data yang diperoleh dari aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
  - f) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
  - g) Lakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat dari permasalahan tersebut.
  - h) Lakukan analisa secara komprehensif.
  - i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 3) TAO: Distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota tidak sesuai dengan ketentuan.
- Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan SOP/ Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 terkait distribusi dari provinsi ke kab/kota.
  - b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota.
  - c) Lakukan perbandingan antara SOP/ Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dengan kondisi di lapangan.
  - d) Dapatkan dokumen DO/SBBK dari PT. Biofarma (Persero) ke provinsi.
  - e) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, jumlah, spesifikasi, *Vaccine Vial Monitor (VVM)*, dan *expired date*.
  - f) Lakukan wawancara atau analisis untuk mengetahui penyebab permasalahan yang muncul.
  - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain (Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier)* tidak sesuai dengan kebutuhan.



Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain (Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier)* sesuai dengan kebutuhan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen/data rencana kebutuhan peralatan pendukung/logistik (*ADS, Alcohol Swab, Safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain (Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier)* kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk tingkat provinsi dan dasar perhitungannya.
- b) Lakukan uji fisik/stock opname terhadap peralatan pendukung/logistik (*ADS, Alcohol Swab, Safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain (Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier)* kegiatan vaksinasi COVID-19 yang berasal dari APBN dan Sumber lain, tuangkan dalam Berita Acara.
- c) Bandingkan *stock opname* dengan data yang diperoleh dari aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- d) Catat hal-hal yang tidak sesuai/penyimpangan.
- e) Lakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.
- f) Lakukan wawancara/pendalaman untuk mengetahui penyebab dan akibat atas ketidaksesuaian.
- g) Lakukan analisa secara komprehensif.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

#### b. Monitoring

- 1) TAO: Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: memastikan permasalahan hasil monitoring ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen laporan hasil monitoring vaksinasi COVID-19 dari pusat untuk provinsi;
- b) Catat permasalahan-permasalahan hasil monitoring dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh provinsi

- c) Dapatkan data/informasi terkait pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring yang dilakukan oleh provinsi-
- d) Catat apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- e) Lakukan wawancara dengan pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat atas tidak dilakukannya tindak lanjut hasil monitoring.
- f) Lakukan analisa secara komprehensif.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai jadwal.

Tujuan Pengawasan: memastikan monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 dilakukan sesuai jadwal.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jadwal monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 dari provinsi ke kabupaten/kota.
- b) Dapatkan laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 ke kabupaten/kota
- c) Bandingkan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 dengan jadwal yang telah disusun.
- d) Cek apakah penilaian kesiapan dengan *tool* VIRAT (*Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool*) dengan pendekatan *self-assessment* telah dilakukan setiap bulan.
- e) Bandingkan hasil pencatatan *tool* VIRAT dengan kondisi riil di lapangan.
- f) Catat bila ada ketidaksesuaian.
- g) Lakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian dan akibatnya.
- h) Lakukan analisa secara komprehensif.
- i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Target output yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Tujuan Pengawasan: memastikan target output yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen resmi berupa :

- (1) Dokumen target output yang akan dicapai terkait vaksinasi COVID-19.
  - (2) Dokumen capaian / realisasi output yang telah dicapai terkait vaksinasi COVID-19.
  - b) Teliti dan analisa antara dokumen target dan realisasi apakah terdapat gap / perbedaan diantara keduanya.
  - c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
  - d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran.  
Tujuan Pengawasan: memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran  
Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan dokumen penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin yang sudah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan.
  - b) Dapatkan data penerima vaksin di tingkat provinsi dari aplikasi P-care atau sumber lain.
  - c) Lakukan penelusuran terhadap ketepatan kriteria sasaran (umur, komorbid, dan lain-lain sesuai juknis).
  - d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 5) TAO: Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti.  
Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.  
Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan jumlah fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Provinsi.
  - b) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi. Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.

- c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPi yang tercantum dalam laporan.
- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

6) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
- b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
- c) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- d) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
- e) Identifikasi permasalahan yang ada.
- f) Temukan penyebab permasalahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

c. Sarana Prasarana dan Logistik

1) TAO: Kualitas *cold chain* di provinsi seperti, *cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer* tidak memadai.

Tujuan Pengawasan: memastikan kualitas *cold chain* vaksin di provinsi seperti, *cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer* telah memadai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen SOP/peraturan pengelolaan peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*).
- b) Dapatkan dokumen jumlah peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*) yang belum berfungsi dengan baik di provinsi/kabupaten/kota.

- c) Lakukan uji fisik terhadap peralatan pendukung (*cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer*) apakah telah sesuai dengan standar Nasional.
- d) Bandingkan jumlah vaksin dengan kapasitas *cold chain* yang ada di provinsi.
- e) Bandingkan SOP/peraturan dengan pengelolaan peralatan pendukung (*cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer*) yang dilakukan oleh petugas di provinsi.
- f) Lakukan wawancara dengan petugas atau penanggung jawab vaksinasi di provinsi/kabupaten/kota mengenai kondisi peralatan pendukung (*cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer*).
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

### C. Kabupaten/Kota

*Tentative Audit Objective* (TAO) di level kabupaten/kota dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Pemda kabupaten/kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
2)	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran
3)	Distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke Fasyankes tidak sesuai dengan ketentuan
4)	Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik ( <i>Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box</i> ), Alat Pelindung Diri (APD) dan <i>Cold Chain</i> ( <i>Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier</i> ) tidak sesuai dengan kebutuhan
b.	Monitoring
1)	Permasalahan KIPi tidak segera ditindaklanjuti
2)	Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal
3)	Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai
4)	Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran
5)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

c.	Sarana Prasarana dan Logistik
1)	Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar
2)	Kualitas <i>cold chain</i> (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota seperti, <i>coldroom</i> , <i>freeze room</i> , <i>refrigerator</i> , dan <i>freezer</i> tidak memadai

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) TAO: Pemda kabupaten/kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi.

Tujuan Pengawasan: memastikan daerah mempunyai dana dukungan vaksinasi.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Identifikasi usulan kebutuhan dana vaksinasi di kabupaten/kota.
- b) Identifikasi alokasi anggaran untuk kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota dari berbagai sumber .
- c) Lakukan konfirmasi apabila terjadi gap antara usulan dengan alokasi anggaran vaksinasi.
- d) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran.

Tujuan Pengawasan: meyakini jumlah vaksin COVID-19 yang diterima sesuai dengan jumlah sasaran

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah kebutuhan vaksin COVID-19 untuk kabupaten/kota dalam dua kali dosis.
- b) Dapatkan jumlah vaksin COVID-19 yang diterima dari provinsi.
- c) Bandingkan kebutuhan vaksin dengan jumlah vaksin yang diterima.

- d) Lakukan konfirmasi kepada petugas terkait apabila terjadi gap antara kebutuhan vaksin dengan vaksin yang diterima.
- e) Lakukan analisis terhadap gap yang ada.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke Fasyankes tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke Fasyankes sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 terkait distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke Fasyankes.
- b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke Fasyankes.
- c) Dapatkan dokumen SBBK/BAST.
- d) Lakukan penelusuran terhadap distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke Fasyankes yang telah dilakukan.
- e) Lakukan perbandingan antara SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 distribusi vaksin dengan distribusi yang telah dilakukan (jadwal dan mekanisme).
- f) Lakukan wawancara atau analisis untuk mengetahui penyebab permasalahan yang muncul.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain (Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier)* tidak sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain (Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier)* sesuai dengan kebutuhan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Identifikasikan kebutuhan peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri

(APD) dan *Cold Chain* (*Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier*) kegiatan vaksinasi COVID-19.

- b) Identifikasikan jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain* (*Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier*) yang diterima di tingkat kabupaten/kota.
- c) Peroleh data distribusi peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain* (*Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier*) ke fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19.
- d) Lakukan uji fisik/stock opname terhadap peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain* (*Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier*), tuangkan dalam Berita Acara.
- e) Lakukan uji petik terhadap ketersediaan peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), Alat Pelindung Diri (APD) dan *Cold Chain* (*Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine Carrier*) di Fasyankes terpilih.
- f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

#### b. Monitoring

- 1) TAO: Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota.
- b) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara berkala dari fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota. Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.



- c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI di Fasyankes terpilih.
- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal.  
Tujuan Pengawasan: meyakini pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Peroleh laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di fasyankes melalui aplikasi P-care dan Aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- b) Identifikasi Fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
- c) Dapatkan laporan manual dari Fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
- d) Telusuri upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota atas fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
- e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai.  
Tujuan Pengawasan: meyakini target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data sasaran target kegiatan vaksinasi COVID-19 di tingkat kabupaten/kota.
- b) Tentukan pencapaian target kegiatan vaksinasi COVID-19 di tingkat kabupaten/kota.
- c) Telusuri penyebab tidak tercapainya target kegiatan vaksinasi COVID-19 di tingkat kabupaten/kota.

- d) Lakukan uji petik pencapaian sasaran kegiatan vaksinasi COVID-19 pada Fasyankes terpilih.
  - e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
  - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran.

Tujuan Pengawasan: memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin yang sudah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan.
  - b) Dapatkan data penerima vaksin di tingkat kabupaten/kota dari aplikasi P-care atau sumber lain.
  - c) Lakukan penelusuran terhadap ketepatan kriteria sasaran (umur, komorbid, dan lain-lain sesuai juknis).
  - d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 5) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang berlaku

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
- b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
- c) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- d) Bandingkan kondisi dengan kriteria.

- e) Identifikasi permasalahan yang ada.
- f) Temukan penyebab permasalahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam Kertas Kerja.

c. Sarana Prasarana dan Logistik

1) TAO: Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar.

Tujuan Pengawasan: memastikan mutu vaksin dalam penyimpanan sesuai standar.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen vaksin yang diterima di tingkat kabupaten/kota.
- b) Dapatkan dokumen vaksin yang telah didistribusikan dari Kabupaten/Kota ke Fasyankes.
- c) Lakukan Inspeksi stok vaksin COVID-19 di tempat penyimpanan vaksin.
- d) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat penyimpanan vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.
- e) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar
- f) Dapatkan data vaksin untuk FEFO (*First Expired First Out*)
- g) Dapatkan data vaksin untuk FIFO (*First In First Out*)
- h) Dapatkan data vaksin yang telah kadaluwarsa.
- i) Lakukan inspeksi vaksin untuk melihat VVM masuk klasifikasi A, B, C atau D.
- j) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
- k) Lakukan pendalaman mengetahui sebab dan akibat permasalahan yang terjadi.
- l) Lakukan analisa secara komprehensif.
- m) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Kualitas *cold chain* vaksin di kabupaten/kota seperti, *cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer* tidak memadai.

Tujuan Pengawasan: memastikan kualitas *cold chain* (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota seperti, *coldroom, freeze room, refrigerator, dan freezer* telah memadai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen jumlah peralatan pendukung (*cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer*) yang belum berfungsi dengan baik di kabupaten/kota.
- b) Lakukan uji fisik terhadap peralatan pendukung (*cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer*) apakah telah sesuai dengan standar Nasional.
- c) Bandingkan jumlah vaksin dengan kapasitas *cold chain* yang ada di kabupaten/kota
- d) Bandingkan SOP/peraturan dengan pengelolaan peralatan pendukung (*cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer*) yang dilakukan oleh petugas di kabupaten/kota.
- e) Lakukan wawancara dengan petugas atau penanggung jawab vaksinasi di kabupaten/kota mengenai kondisi peralatan pendukung (*cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer*).
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

#### D. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

*Tentative Audit Objective (TAO)* di level Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Vaksin COVID-19 tidak disimpan di <i>cold chain</i> sesuai standard
2)	Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar
b.	Pelaksanaan
1)	Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan
2)	Terdapat kejadian Drop Out
3)	KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti
4)	Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran
c.	Monitoring
1)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE
2)	Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai
3)	Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal
4)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) TAO: Vaksin COVID-19 tidak disimpan di *cold chain* sesuai standard.

Tujuan Pengawasan: meyakini vaksin COVID-19 disimpan di *cold chain* (rantai dingin) sesuai standar.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dan pelajari ketentuan kriteria *cold chain* (rantai dingin) pada Fasyankes untuk vaksinasi COVID-19.
- b) Identifikasi jumlah peralatan *cold chain* (rantai dingin) yang ada di fasyankes. Berikut kondisi/kelayakan *cold chain* tersebut.
- c) Bandingkan peralatan *cold chain* (rantai dingin) yang ada di Fasyankes dengan ketentuan kriteria yang berlaku. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- d) Lakukan uji fisik/*stock opname* terhadap jumlah dan kondisi vaksin COVID-19, tuangkan dalam Berita Acara.
- e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar.

Tujuan Pengawasan: memastikan mutu vaksin dalam penyimpanan sesuai standar.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen vaksin yang diterima di fasyankes.
- b) Dapatkan dokumen vaksin yang telah diterima fasyankes.
- c) Lakukan Inspeksi stok vaksin COVID-19 di tempat penyimpanan vaksin.
- d) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat

penyimpanan vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.

- e) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar.
- f) Dapatkan data vaksin untuk FEFO.
- g) Dapatkan data vaksin untuk FIFO.
- h) Dapatkan data vaksin yang telah kadaluarsa.
- i) Lakukan inspeksi vaksin untuk melihat VVM masuk klasifikasi A, B, C atau D.
- j) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
- k) Lakukan pendalaman mengetahui sebab dan akibat permasalahan yang terjadi.
- l) Lakukan analisa secara komprehensif.
- m) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

#### b. Pelaksanaan

- 1) TAO: Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes telah mematuhi protokol kesehatan.

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan ketentuan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di fasyankes (Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19).
- b) Lakukan observasi terhadap penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di fasyankes.
- c) Bandingkan hasil observasi dengan ketentuan protokol kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 2) TAO: Terdapat kejadian *Drop Out*.

Tujuan Pengawasan: meyakini semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan ketentuan pemberian dosis vaksin COVID-19 untuk masing-masing jenis vaksin.
- b) Dapatkan ketentuan *Drop Out* vaksinasi COVID-19.
- c) Dapatkan jumlah sasaran pada fasyankes.
- d) Dapatkan jumlah sasaran pada fasyankes yang telah menerima vaksinasi COVID-19 dengan dosis yang lengkap.
- e) Dapatkan jumlah sasaran yang *Drop Out* pada fasyankes.
- f) Telusuri penyebab terjadinya *Drop Out*.
- g) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini KIPI pada vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan register penerima vaksinasi COVID-19 di fasyankes.
- b) Identifikasikan penerima vaksinasi yang mengalami KIPI.
- c) Telusuri tindak lanjut atas kejadian KIPI.
- d) Lakukan Uji petik ke pihak terkait (penerima vaksinasi dan pemberi layanan tindak lanjut KIPI)
- e) Identifikasi KIPI yang tidak ditindaklanjuti dan telusuri penyebabnya.
- f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran.

Tujuan Pengawasan: memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin yang sudah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan.
- b) Dapatkan data penerima vaksin di tingkat fasyankes dari aplikasi P-care atau sumber lain.

- c) Lakukan penelusuran terhadap ketepatan kriteria sasaran (umur, komorbid, dan lain-lain sesuai juknis).
- d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

c. Monitoring

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE.

Tujuan Pengawasan: meyakini fasilitas pelayanan kesehatan telah terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Pelajari data aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE pada fasyankes, berikut tata cara penggunaannya.
- b) Lakukan konfirmasi dengan petugas pengguna aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE terkait terhadap pencatatan dan pelaporan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- c) Cermati kesesuaian pencatatan dan pelaporan yang ada pada aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE dengan data register manualnya.
- d) Lakukan wawancara kepada petugas terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 2) TAO: Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai.

Tujuan Pengawasan: meyakini target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan target sasaran COVID-19 di fasyankes.
- b) Dapatkan sasaran yang telah menerima pelayanan vaksinasi COVID-19 di fasyankes.
- c) Tentukan capaian sasaran vaksinasi COVID-19.
- d) Telusuri penyebab tidak tercapainya target kegiatan vaksinasi COVID-19 di fasyankes.
- e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.



f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan: meyakini pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

a) Peroleh laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di fasyankes melalui aplikasi P-care dan Aplikasi SMILE.

b) Dapatkan laporan manual dari fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan Aplikasi SMILE.

c) Yakinkan laporan manual diinput kedalam aplikasi P-care dan Aplikasi SMILE pada hari berikutnya.

d) Telusuri upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota atas fasyankes yang tidak menginput laporan manual kedalam aplikasi P-care dan Aplikasi SMILE.

e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.

f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen pendukung dan peraturan terkait.

b) Dapatkan alokasi anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di fasyankes.

c) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di fasyankes.

d) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

e) Bandingkan kondisi dengan kriteria.

f) Identifikasi permasalahan yang ada.

- g) Temukan penyebab permasalahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,



ERI SATRIANA